

KESULTANAN TERNATE PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Rustam Hasim

rustamhasyim@gmail.com

Universitas Khairun

Abstract

This paper discusses the role of the sultan of Ternate Iskandar Djabir Sjah during the Japanese occupation of North Maluku. This paper answers two main questions, first, what is the response of the Sultan of Ternate Iskandar Djabir Sjah to the presence of Japan in North Maluku, Second, how far is Sultan Iskandar Djabir Sjah's political support for the Allies and its impact on the existence of the Japanese Occupation in North Maluku. Basically this study is historical research on political activities involving the Sultanate elite using historical methods ranging from heuristics to historiography. This process requires analytical tools using political science concepts to help broaden the study. The sources used in this study consisted of written sources and interviews. This study concludes that since the presence of Japan in North Maluku in 1942, they wanted to conquer the Sultanate of Ternate under their control. Political activity is prohibited and restricted, socio-economic life is in decline. The population is regulated in such a way that it is easy to supervise. All economic activity is aimed at helping the armed forces. In the field of education, schools are still operating normally, but their function is as a place for Japanese propaganda.

Keywords: Political History, Japan, the Sultanate of Ternate, the Sultan of Ternate, and National Politics.

PENGANTAR

Pada masa pendudukan Jepang, Maluku Utara merupakan salah satu dari ke empat wilayah pemerintahan di Indonesia bagian Timur. Keempat wilayah itu adalah Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin, Sulawesi dengan ibu kota Makassar, Nusa Tenggara dengan ibu kota Denpasar di Bali dan Maluku dengan ibu kota Ambon. Masing-masing wilayah ini dikuasai seorang Gubernur Militer. Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*). (Sutrisno Kutoyo, 1977).

Sejak kehadirannya di Ternate, pemerintah militer Jepang senantiasa mempropagandakan posisinya sebagai saudara tua dari rakyat setempat yang disebutnya saudara muda. Propaganda

lainnya adalah Gerakan 3A. Yakni, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia. Propaganda itu bertujuan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam Perang Asia Timur Raya. Propaganda itu untuk meningkatkan hubungan dan dukungan penduduk kepada Jepang. Hubungan yang pada saat yang sama akan memudahkan pengaruh Belanda.

Jepang kemudian juga menggantikan sistem pendidikan di sekolah-sekolah peninggalan Belanda dengan sistem pendidikan Jepang berbasis pengajaran bahasa Jepang. Bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta semua pelajaran yang bercorak Belanda atau Eropa, dilarang untuk diajarkan. Selain itu, pada bidang politik, semua organisasi dan gerakan politik, seperti partai politik, organisasi pemuda, atau apapun yang berbau politik dan bertentangan

dengan ideologi Jepang, dilarang sama sekali. Sejak saat itu, organisasi pergerakan nasional yang ada di Ternate, tidak menampakkan diri.

Untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, tentara Jepang menjadikan wilayah Kao (Halmahera Utara) sebagai pusat pertahanan angkatan perang di kawasan Pasifik. Sementara untuk membantu tentara Jepang memenangkan peperangan melawan Sekutu, maka direkrut bekas tentara KNIL untuk dijadikan *heiho*. Mereka dididik dan dilatih selama tiga bulan oleh seorang perwira tinggi Jepang yang bernama Fujia Egawa yang sebelum Perang Dunia II telah berdomisili di Ternate. Para anggota *heiho* tersebut yang kemudian dikenal sebagai Pasukan Kuning dari Utara, dikirim ke medan perang dalam dua kelompok. Kelompok pertama dikirim ke Ambon dan kelompok kedua dikirim ke Kao bersama tentara Jepang sesuai strategi perang

Dalam membantu prajurit Jepang, mereka merekrut para pemuda Maluku Utara ke dalam Heiho untuk didik dan dilatih sebagai prajurit angkatan perangnya. Setelah selesai pendidikan yang berlangsung selama tiga bulan, mereka kemudian dikirim ke daerah-daerah perang sebagai pekerja, di beberapa pangkalan militer Jepang yang dibangun di sejumlah kawasan di Maluku Utara, seperti; di Kao, Subaim, Wasilei, Galela, Morotai, dan Bacan. Jumlah anggota Heiho dari Maluku Utara, diperkirakan sebanyak 3.000 orang. Pekerjaan membangun fasilitas militer Jepang baru berakhir, setelah pasukan Sekutu menduduki Morotai pada 25 April 1945 dan melakukan pemboman basis-basis pertahanan Jepang di Halmahera Utara dan Tengah.

Meski Jepang telah menguasai wilayah Ternate dan melakukan penataan kedudukan kekuasaan dan pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial, tetap saja mereka tidak menganggap aman Kota Ternate. Hal itu berkaitan dengan Sultan Ternate Iskandar

Djabir Sjah belum memberi dukungan politik kepada Jepang. Sultan juga dituduh menyembunyikan orang-orang Belanda di *kadaton* Ternate. Hal itu membuat serdadu Jepang setiap hari datang mengawasi *kadaton*. Begitu seringnya mereka datang ke *kadaton*, sehingga membuat Sultan Iskandar Djabir Sjah menjadi marah. Akhirnya sultan menyurati Fujia Egawa sebagai penanggungjawab keamanan di Maluku Utara untuk melarang para tentara Jepang yang selalu mematai-matai sultan. Dengan alasan politik, Jepang mempunyai kepentingan dengan sultan, maka Fujia Egawa mengeluarkan surat larangan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sultan dan keluarganya.

Berpijak dari realitas tersebut tulisan ini menjawab dua pertanyaan utama, *pertama*, bagaimana respon Sultan Ternate Iskandar Djair Sjah atas kehadirannya Jepang di Maluku Utara, *Kedua*, sejauhmana dukungan politik Sultan Iskandar Djabir Sjah terhadap Sekutu dan dampaknya terhadap eksistensi Pendudukan Jepang di Maluku Utara. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut tulisan ini akan dimulai dengan memaparkan terlebih dahulu tentang, Maluku pada masa pendudukan Jepang meliputi; keadaan pemerintahan, kehidupan sosial ekonomi, dan kehidupan pendidikan dan budaya sebagai pintu masuk memahami realitas historis dari tulisan ini.

A. MALUKU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada tahun 1941 tentara Jepang memaklumkan perang terhadap sekutu. Berkobarlah perang Pasifik di Asia yang merupakan sebagian dari perang dunia II. Dengan sangat cepat tentara Jepang dapat menduduki seluruh Indonesia. Jepang menyebarkan pamflet dengan pesawat terbang sampai ke desa-desa. Dalam pamflet-pamflet dan gambar-gambar yang disebar

itu berisi antara lain: (1). Jepang akan membebaskan rakyat Asia dari setan-setan orang kulit putih, (2), Jepang akan datang untuk membuang setan-setan, (3).Gambar-gambar yang membuat kebangunan Asia, (4), Gambar-gambar yang melukiskan kedatangan Jepang bukan untuk berperang dengan orang-orang Asia, tetapi datang untuk makan pisang bersama-sama dengan orang Asia, dan (5), Jepang adatang untuk bekerja sama dengan orang-orang Indonesia.

Kemenagan Jepang atas Belanda ditanggapi oleh rakyat dengan berbagai reaksi. Dapat dikatakan reaksi masyarakat Maluku atas kemenangan (kedatangan) Jepang ini dapat dibagi atas tiga longan:

- a. Golongan Islam, menyambut Jepang sebagai pembuka belunggu penindasan dan menganggap Belanda sebagai penindas. Mereka menyambut kedatangan Jepang dengan suatu kegembiraan yang dinyatakan melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh mereka dalam menumpas kaki tangan Belanda di daerah.
- b. Golongan Kristen, melihat kedatangan Jepang sebagai datangnya suatu malapetaka besar atas jiwa dan keamanan mereka. Mereka melepaskan Belanda sebagai melepaskan pembela dan penyokong mereka.
- c. Golongan pergerakan nasional, menerima Jepang dengan suatu sikap hati-hati. Mereka mempergunakan kesempatan ini untuk menyusun diri yang pada masa perang dikocar-kacirkan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dan golongan ini terdiri dari orang-orang Kristen dan Islam.

Akan tetapi dalam perkembanganya politik pemerintah Jepang mulai berubah terhadap masyarakat Maluku dan mulai kelihatan apa maksud dan tujuan mereka. Jepang datang bukannya sebagai kaka kepada adik seperti apa yang mereka propandakan, tetapi mereka ingin

menaklukan daerah ini agar tunduk dibawah kekuasaan Jepang. Kegiatan organisasi politik dilarang keras, mereka mulai mengemukakan pandangan radikal tentang hak milik, yang menurut Jepang bahwa manusia, tanah air, tumbuhan dan binatang itu semua milik Nippon (Jepang). Pandangan ini telah membuat suatu kejutan bagi rakyat yang sudah erbiasa atas pemilikan pribadi dan kebebasan pribadi.

1. Keadaan Pemerintahan

Pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun mengubah seluruh struktur masyarakat kolonial yang dibina oleh Belanda. Dalam waktu yag singkat semua orang kulit putih dihilangkan dari pandangan masyarakat. Mereka semua ditawan dalam kamp-kamp konsentrasi. Sebagai pengganti mereka dan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan sebagai pegawai, Jepang mengangkat orang-orang Maluku secara langsung. Pegawai-pegawai bekas pemerintahan Belanda dan guru-guru sekolah tetapbekerja sebagai semula akan tetapi gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat. Meskipun mereka boleh memegang pemerintahan sendiri, namun mereka tidak bebas sama sekali dalam geraknya. Malah kebebasan itu lebih dipersempit lagi daripada di zaman kolonial Belanda. Masyarakat sangat takut terhadap aparat pengamanan dan dinas rohasia atau mata-mata Jepang yaitu Kempetai, semacam Polisi militer yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Organisasi-organisasi sosial hanya dapat didirikan kalau dibentuk sendiri oleh Jepang. Semua organisasi dengan gerakan politik, berupa partai politik, organisasi pemuda atau apapun yang berbau politik dan bertentangan dengan ideologi Jepang dilarang sama sekalai. Sejak saat itu organisasi pergerakan nasional yang sudah ada di Ambon dan di tempat-tempat lain tidak lagi menampakan diri. Untuk membantu tentara Jepang memenangkan peperangan melawan sekutu, maka bekas tentara KNIL dijadikan Heiho

yaitu pembantu prajurit Jepang dan dikirim ke daerah-daerah perang sebagai pekerja. Pengawasan yang ketat juga dilakukan terhadap masyarakat, terlebih di kota-kota. Dapat dikatakan bahwa kehidupan waktu pada itu serba menakutkan.

Selama pendudukan Jepang tidak terdapat perubahan-perubahan yang penting di dalam tata pemerintahan. Pemerintahan lebih bersifat militer atau disesuaikan dengan kepentingan militer. Pada waktu itu juga terdapat aparat-aparat pemerintahan sipil yaitu Minseibu Chokan, semacam kepala daerah yang berkedudukan di Ambon, Tual dan Ternate. Namun dalam banyak hal kekuasaan pemerintahan sipil ini dibatasi atau tunduk kepada kekuasaan militer, sehingga wewenang pemerintahan sipil hampir tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut berlangsung hingga menyerahkan Jepang pada sekutu tahun 1945.

Pendudukan Jepang atas Indonesia selama tiga setengah tahun mengubah seluruh struktur masyarakat kolonial yang dibina oleh Belanda itu. Dalam sekejap mata saja semua orang kulit putih lenyap dari pandangan umum karena dimasukkan dalam kampung konsentrasasi Jepang. Sebagai pengganti mereka, tentara pendudukan Jepang mengangkat orang-orang Indonesia. Orang-orang ini menyadari kenyataan bahwa merekapun dapat menjalankan berbagai badan pemerintahan seperti halnya dengan orang-orang Belanda. Maka timbulah perasaan bahwa mereka tidak membutuhkan orang-orang Belanda itu. Selain itu martabat dunia Barat yang diwakili oleh Belanda itu hilang samasekali dalam mata mereka.

Biar pun struktur pemerintahan adat tidak dirubah oleh Jepang tetapi pemerintah negeri merasa kehilangan hak-hak warisan mereka atas tanah, hutan dan tanah yang mereka miliki atau yang diwariskan oleh orang tua mereka. Walaupun ada kegelisahan yang demikian tetapi tidak ada seorang pun berani melawan kekuasaan Jepang. Organisasi

politik tidak dapat bergerak, biarpun mereka diberi kekuasaan dalam beberapa bidang, tetapi tokoh-tokoh ini tidak berani menentang kekuasaan Jepang. Jepang memerintah dengan tangan besi, setiap gerakan akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Masyarakat sangat takut terhadap dengan aparat keamanan dan dinas rahasia Jepang yaitu Kempeti, yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas.

2. Kehidupan sosial ekonomi

Suasana peperangan yang tidak henti-hentinya telah menghambat pembangunan ekonomi yang disusun oleh Jepang untuk daerah Maluku. Masyarakat Maluku yang berdiam di kota-kota pada umumnya menggunakan beras merupakan bahan makanan pokok, sedangkan daerah ini bukan daerah penghasil beras. Zaman Belanda beras di datangkan dari luar daerah, tetapi sekarang karena peperangan maka suplai bahan makanan ini macet. Pulau Jawa maupun Sulawesi tidak dapat lagimensuplai secara kontinyu beras yang diperlukan daerah Maluku karena di daerah ini terasa juga adanya kekurangan bahan pokok ini.

Kehidupan sosial dan ekonomi merosot sama sekali. Kehidupan rakyat, terutama mereka yang tidak mempunyai hubungan resmi dengan pemerintahan militer Jepang tidak menyenangkan. Penduduk diatur sedemikian rupah sehingga muda diawasi. Mereka yang mempunyai anggota-anggota keluarga yang dicurigai Jepang, selalu hidup dengan perasaan bahwa sewaktu-waktu Kempetai akan menagkap mereka dan pasti membunuhnya. Suasana yang demikian terhadap di kota-kota maupun di desa-desa.

Koperasi adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk menjual barang-barang keperluan rakyat. Tokoh-tokoh sama sekali tidak berfungsi lagi, karena tidak adanya barang yang akan diperdagangkan. Semua bahan dagang yang utama yaitu sandang dan pangan dimonopoli Jepang dan disalurkan melalui koperasi. Pada

setiap desa di instruksikan mendirikan koperasi untuk melayani masyarakat desa membeli bahan keperluan seperti beras, garam, gula, ikan asin, kain, terigu dan bahan lainnya. Untuk mendapa bahan ini maka pimpinan koperasi (biasanya pemuka rakyat) mengajukan surat permintaan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Surat ini diajukan pada badan pelaksana pusat koperasi yang berkedudukan di Ambon. Melalui badan inilah daftar permintaan itu dimasukan dalam daftar tersendiri dengan daftar dari koperasi di desa-desa lain untuk dimintakan dengan daftar-daftar dari bagian penyaluran bahan makanan Jepang. Setelah bahan ini dikeluarkan, baru badan pelaksana menyalurkan ke desa-desa sesuai dengan jumlah yang mereka minta.

Kedaan ekonomi dapat dikatakan macet sama sekalai dan ini mengakibatkan kemelaratan. Semua kegiatan ekonomi ditujukan untuk membantu angkatan perang Jepang. Para petani dan buruh memikul beban ekonomi yang berat. Mereka di jadikan “Rumusha” yaitu pekerja-pekerja paksa yang tidak di gaji, kadang-kadang diberi makan tidak cukup dan kesehatannya samasekali tidak terjamin. Banyak yang meninggal dunia karena sakit, kelaparan dan di siksa oleh tentara Jepang. Para petani dan nelayan tidak luput dari pemerasan. Sebagian hasil panen harus diserahkan pada Jepang, bahkan sering dipaksa menyerahkan seluruhnya. Kalau dibayar itupun dengan harga yang tidak memadai. Bagi golongan menengah, bangsawan dan hartawan jelas bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kedudukannya seperti pada zaman sebelum tibanya Jepang. Semua harta kekayaan mereka diambil oleh Jepang. Selanjutnya golongan buruh lainnya tidak luput dari siksaan. Mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan Jepang. Kadang-kadang mereka harus berpisah dengan keluarganya ke tempat-tempat kerja yang jauh dengan resiko yang besar.

Untuk menanggulangi kedaan ekonomi yang makin merosot dari hari ke hari, Jepang memaksa rakyat untuk bekerja di perkebunan Jepang dengan upah yang sangat rendah. Kemudaian atas prakarsa Jepang rakyat dibagi berkelompok untuk membuka kebun-kebun baru dan hasilnya dibagi dua, setengahnya untuk Jepang dan setengah untuk kelompok kerja, dan kebun semacam ini disebut Tonari. Negari dibagi menurut keterampilan yang mereka memiliki dalam memproduksi bahan pangan. Misalnya negri dengan mata pencaharian rakyatnya nelayan ditugaskan untuk membuat alat-alat penangkapan ikan dan diwajibkan mencari ikan yang hasilnya dibagi dua dengan Jepang. Negeri yang mata pencariannya membuat gula aren ditugaskan membuat gula aren untuk kepentingan tentara Jepang.

Dalam biadang pengerahan tenaga, Jepang telah mengumpulkan sejumlah tenaga di desa-desa sebanayak lima puluh atau seratus orang laki-laki untuk memukul sagu dan mengusahakan bahan makanan lain di hutan-hutan Ambon, Seram dan Buruh. Karena pada prinsipnya seluruh alam dan isinya ini milik Nippon, maka Jepang juga berkuasa atas hutan-hutan sagu rakyat. Tenaga ini di kerahkan ke hutan-hutan sagu tanpa seijin yang empunya, hanya kepala desa yang diberitahukan bahwa tenaga Jepang akan bekerja di hutan sagu desa itu untuk mengambil sagunya.

Tindakan-tindakan Jepang bukan hanya merampas harta benda, memperkosa hak-hak rakyat, akan tetapi mereka juga menghukum rakyat diluar perikemanusiaan. Selain itu perbuatan asusila dilakukan oleh prajurit-prajurit Jepang, terutama terhadap para wanita dan gadis-gadis. Masa pendudukan tiga setengah tahun itu sebenarnya tidak terlalu lama, akan tetapi bagi rakyat Maluku dianggap cukup lama karena penderitaan yang dialami benar-benar berat

3. Kehidupan Pendidikan dan Budaya

Khusus dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah masi berjalan seperti biasa, akan tetapi fungsi sekola tak ubahnya sebagai tempat propaganda Jepang. Masyarakat dilarang keras menggunakan bahasa Belanda, bahkan buku-buku berbahasa Belanda diharuskan dibakar. Semua sekolah-sekolah Belanda (H.I.S., M.U.L.O.) ditutup. Sebagai bahasa pengantar untuk sementara dipergunakan bahasan Indonesia. Selanjutnya bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan dikantor-kantor. Bagi pegawai negeri diadakan ujian. Yang lulus dalam ujian mempergunakan bahasa Jepang (membaca dan menulis) mendapat hadiah tambahan gaji. Setiap pagi sebelum bekerja dan belajar, semua pegawai dan murid-murid harus melakukan senam pagi (taiso). Latihan-latihan jasmani secara seperti sumo (bergulat), yudo (silat), kendo (silat memakai pedang) diajarkan di sekolah-sekolah. Para pemuda diharuskan mengikuti latihan-latihan kemiliteran yang kemudian dipakai membantu tentara Jepang. Mereka diorganisasi dalam barisan Keobodan (barisan bantu polisi), Seinendon (barisa pemuda), Sui Sin Tai (barisan pelopor) dan lain-lain. selainitu Heiho dipersenjatai untuk tugas-tugas kemanan dan pertahanan. Untuk memperkuat mental masyarakat yang pro Jepang, diadakan propaganda-propaganda yang mengambil hati rakyat seperti: Nippon adalah pelindung Asia; Nippon adalah saudara orang Indonesia; hancurkan Belanada dan Inggris serta lain-lain semboyan.

Pergerakan Nasional baru pada tahun 1944. Inipun dengan pengawasan ketat dari pihak Jepang. Di Jawa sejak semula terdapat komite-komite Ambon yang bertugas untuk membantu keluarga-keluarga Ambon yang ditimpah malah petaka atau ancaman Kempeitai. Salah satu dari organisasi-organisasi semacam ini adalah Badan Pertolongan Ambon Timur (BAPATI) di Jakarta. Di dalam badan ini tergabung tokoh-

tokoh Maluku yang sebelum perang terkenal dalam dunia pergerakan nasional. Antara lain terdapat dr. J. Kayadu, bekas ketua sarekat Ambon. Selain itu juga terdapat Mr. J. Latuharhary, bekas ketua sarekat Ambon di Surabaya sejak tahun 1942 telah dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Kemudian J. D. Syaranamual, A. C. Tupamahu, P. A. de Queljoe, dan S. J. Pieter, semuanya bekas anggota sarekat Ambon yang dibubarkan itu.

Tokoh-tokoh pergerakan tersebut dibatasi kebebasan dan bidang gerakannya. Para cendekiawan di tugaskan memutar roda pemerintahan sehari-hari membantu Jepang. Ada dari golongan ini mati dibunuh karena dianggap mata-mata dan pro pemerintah Belanda. Tokoh-tonkoh pergerakan nasional di Ambon dan tempat-tempat lain mengubah taktik mereka dan bekerjasama dengan Jepang terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan. Karena penganiyayaan dan tekanan fisik yang keras kadang-kadang timbul perlawanan terhadap Jepang, terutama dari para Heiho. Mereka dikejar-kejar dan keluarganya dibunuh. Setelah kapitulasi tahun 1945 banyak diantara mereka yang selamat.

Hubungan dengan dunia luar tertutup sama sekali. Alat-alat komunikasi dan media massa dapat dikatakan tidak ada. Siaran-siaran radio diawasi dan hanya kemenangan-kemenangan Jepang di medan perang yang disiarkan kedalam masyarakat. Hubungan kaum pergerakan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional di pulau Jawa sangat sulit. Mereka hanaya dapat berhubungan melalui gerakan-gerakan dibawah tanah. Melalui mata-mata sekutu, mereka dapat menganalisa situasi dan keadaan perang untuk mempersiapkan diri bagi perjuangan kemerdekaan. Dengan sangat hati-hati mereka berusaha melatih dan mengorganisasi para pemuda dan masyarakat lainnya dalam sarana-sarana yang telah diciptakan Jepang untuk perjuangan mereka. Setelah Jepang

menyerah pada bulan Agustus tahun 1945 persiapan-persiapan dan latihan-latihan tersebut diarahkan ke perjuangan kemerdekaan melawan Belanda.

Kebebasan untuk berorganisasi sangat dibatasi, jauh kurang lagi daripada batasan-batasan yang diberikan oleh Belanda. Organisasi-organisasi sosial hanya dapat didirikan apabila dibentuk sendiri oleh Jepang. Untunglah dalam hal ini Jepang masih membutuhkan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Tokoh Pergerakan Nasional dari kalangan Maluku adalah Mr. J. Latuharhary, seorang tokoh terkenal dari sarikat Ambon. Latuharhary rupanya sejak tahun 1942 telah dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta Ia ditempatkan sebagai pegawai di pemerintahan dalam negeri. Sumbangannya bagi masyarakat Maluku masih tetap di jalankannya dengan memasuki organisasi Badan Pertolongan Ambon-Timur bersama tokoh-tokoh sarekat Ambon lainnya. Karena mereka juga berasal dari daerah Indonesia yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, maka tidaklah mengherankan apabila Latuharhary kemudian tertarik pada Asrama Indonesia Merdeka. Demikian pula tokoh-tokoh Sulawesi seperti Dr. Sam Ratulangi dan Mr. A. A. Maramis. Melalui organisasi ini mereka dapat membina kembali hubungan dengan dunia Pergerakan Nasional. Peranan mereka untuk mempertahankan daerah-daerah mereka dalam bualan-bulan pertama sejak diproklamaskannya kemerdekaan Indonesia, sangat penting.

B. PENDUDUKAN JEPANG DI TERNATE

Pada tanggal 5 April 1942, sebanyak 19 kapal perang Jepang mendarat di Pulau Ternate. Kedatangan armada angkatan laut Jepang tersebut mengemparkan penduduk Ternate. Sementara di depan *Kadato* Ternate, Kampung Cina hingga Jembatan

Residen, pesawat-pesawat Jepang menjatuhkan selebaran yang isinya: “Semua orang-orang Belanda dan Tentara KNIL harus menyerahkan diri pada Dai Nippon dan harus berkumpul di Jembatan Residen. Jika dalam waktu satu jam bendera putih tidak dikibarkan, Kota Ternate akan digempur.” Ketika batas waktu yang diberikan telah lewat dan tidak ada tentara KNIL dan pejabat sipil Belanda menyerahkan diri, maka pesawat-pesawat Jepang dan kapal perang menjatuhkan bom dan menembaki Benteng Orange, gudang Coprafonds (Kantor KPM), rumah sakit, dan *kadaton* Tidore. Serangan itu menyebabkan 56 orang tewas, (Chasan Bousoiri, 1982; 19).

Dalam keadaan panik, kontrolir Syirik van der Groot yang bertugas ketika waktu itu, menemui Jeanne dan dr Chasan Boesoirie (keduanya berkerja sebagai dokter Belanda) di rumah sakit dan memerintahkan kepada mereka untuk mengikat seprei putih dan memasangnya di dekat pantai dekat rumah sakit Benteng Orange sebagai tanda menyerah. Untuk memberitahukan penyerahan kepada Jepang, van Diejen, van der Groot, dan dr Chasan Boesoirie menaiki sebuah perahu nelayan menuju ke kapal perang Jepang. Dalam pertemuan itu, mereka diterima Mayor Laut Fujia Egawa. Pada kesempatan itu, kontrolir Syirik van der Groot menandatangani naskah penyerahan kepada Jepang.

Dalam waktu singkat, seluruh penguasa Belanda –baik militer maupun sipil ditawan oleh tentara Jepang. Setelah menduduki dan mengambilalih kekuasaan Belanda di Ternate, Jepang membentuk sebuah pemerintahan militer (*Minsebu*) yang dijabat oleh Noro San, seorang perwira menengah. Pada dasarnya, struktur pemerintahan Hindia Belanda tidak diubah, kecuali penamaannya diganti dengan menggunakan istilah Jepang. Kepala pemerintahan setempat yang dahulunya disebut *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB) atau *afdeling* diganti namanya

menjadi *gunco*. *Onderafdeling* yang membawahi kepala-kepala distrik yang disebut *bungunco* serta nama kepala kampung diganti menjadi *sonco*. ((Herry RD. Nachrawy, 2003 : 46).

Jabatan-jabatan tersebut dipercayakan untuk dijabat penduduk Ternate, kecuali *minseibu* dan ketua pengadilan yang dijabat oleh militer Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengangkat orang-orang Ternate yang pernah menjadi bekas pegawai Pemerintahan Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan seperti pegawai dan guru-guru. Meski mereka boleh memegang pemerintahan sendiri, namun mereka tidak bebas sama sekali, gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat (Tabloid Parada, edisi 17, Januari 2001).

Meski Jepang telah menguasai wilayah Ternate dan melakukan penataan kedudukan kekuasaan dan pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial, tetap saja mereka tidak menganggap aman Kota Ternate. Hal itu berkaitan dengan Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah belum memberi dukungan politik kepada Jepang. Sultan juga dituduh menyembunyikan orang-orang Belanda di *kadaton* Ternate. Hal itu membuat serdadu Jepang setiap hari datang mengawasi *kadaton*. Begitu seringnya mereka datang ke *kadaton*, sehingga membuat Sultan Iskandar Djabir Syah menjadi marah. Akhirnya sultan menyurati Fujia Egawa sebagai penanggungjawab keamanan di Maluku Utara untuk melarang para tentara Jepang yang selalu mematai-matai sultan. Dengan alasan politik, Jepang mempunyai kepentingan dengan sultan, maka Fujia Egawa mengeluarkan surat larangan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sultan dan keluarganya.

Pada tanggal 15 September 1944, pasukan Sekutu yang dikomandoi Jenderal Douglas Mac Arthur, melakukan pendaratan di Pulau Morotai. Di Morotai, pasukan Sekutu kemudian membangun landasan pesawat

terbesar di Pasifik dan menjadikannya sebagai markas komando (*operation base and consolidation*) atau sebagai basis pertahanan untuk menghadang pasukan Jepang yang berada di daerah Kao. Peperangan antara kedua pihak pun dimulai di wilayah Maluku Utara. Kekuatan militer Jepang terus mengalami kemunduran di hampir semua lini pertempuran itu. (Adnan Amal, 2003: 173).

Pada tanggal 17 Oktober 1944, pesawat tempur Sekutu menjatuhkan bom di Pulau Ternate, terutama di Kampung Cina, Kampung Palembang, dan *Fort Orange*, menyebabkan puluhan orang meninggal serta luka parah. Akibatnya, penduduk mengungsi ke luar Pulau Ternate atau membangun lubang perlindungan yang disebut *lofra*. Keesokan harinya, Jepang meminta menggali lubang untuk mengubur para korban, tetapi banyak penduduk yang telah pergi, maka digunakan tenaga narapidana yang ditawan tentara Jepang untuk menggali kuburan massal. Keadaan darurat membuat semua korban dikubur tanpa dikafani.

Sementara itu, di Ternate Selatan, Tentara Jepang dengan kejam melakukan pembantaian massal terhadap rakyat di kampung Kastela dan Rua. Hal itu membuat marah Sultan Iskandar Djabir Syah dan memerintahkan *gorela*, pasukan gerak cepatnya, memantau kegiatan tentara Jepang di wilayah Maluku Utara.

Posisi tentara Jepang yang terus terdesak di berbagai medan pertempuran di Maluku Utara membuat mereka merencanakan menangkap Sultan Iskandar Djabir Syah. Sebagai penguasa di Maluku Utara, Sultan Iskandar Djabir Syah tentu saja memiliki ribuan pendukung setia yang dapat dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan memenangkan perang. Informasi tentang rencana penangkapan sultan diketahui oleh pasukan Sekutu yang berada di Morotai. Pada tanggal 24 April 1945, Sultan Iskandar Djabir Syah menerima surat dari Letnan

Hubertus J. van Mook yang isinya: “Meminta Sultan dan keluarganya meninggalkan Ternate. Orang-orang Indo-Belanda diberi tahu bahwa Ternate akan dibom selama dua hari, yakni pagi hari pada pukul 06.00-09.00 dan sore pukul 16.00-18.00, dengan maksud untuk memberi kesempatan sultan dan keluarganya untuk lolos.” (Chasan Bousoiri, 1982;19).

Pada bulan Mei 1944, panglima perang Sekutu Jenderal Mac Arthur menginstruksikan agar menjemput Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan keluarganya dibawa ke Pulau Morotai. Usaha sekutu tersebut berhasil. Pada tanggal 5 Oktober Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan keluarganya berhasil dievakuasi dari Ternate oleh regu *Hulptropen* dibantu tentara Australia. Ia pertama-tama dibawa ke Pulau Hiri kemudian ke pangkalan Sekutu di Morotai. Setiba di Morotai, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober, atas perintah Jenderal Mac Arthur, mereka diungsikan ke Brisbane, Australia, dan bermukim di sana hingga perang usai.

Berita diungsikannya Sultan Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya oleh Sekutu, membuat Jepang marah. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan sultan untuk kepentingan perangnya. Karena gagal mendapat dukungan dari Iskandar Djabir Syah, Jepang kemudian melantik Muhammad Nasir (saudara Iskandar Djabir Syah) sebagai Sultan Ternate dan ditempatkan di Kao, pusat komando tertinggi Tentara Jepang di Halmahera. Pada waktu yang sama, Sultan Tidore, Zainal Alting, juga dijemput dari Soisio, Tidore, dan ditempatkan di Jailolo. Pengangkatan kedua sultan tersebut merupakan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. (Nachrawy, 2003: 40).

Selama di Australia, Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah tidaklah secara penuh tinggal di sana, hanya keluarganya saja.

Beberapa kali sultan dipanggil ke Morotai karena dibutuhkan oleh Sekutu untuk mempersatukan masyarakat Maluku Utara yang sudah berantakan selama pendudukan Jepang. Selama di Morotai, sultan diperintahkan memberitahu kepada rakyatnya tentang situasi perang yang sedang berlangsung. Pemberitahuan itu disiarkan lewat selebaran berbahasa Ternate, Galela, dan Tobelo agar penduduk menghindarkan diri dari rayuan propaganda Jepang yang menginginkan kemenangan dalam Perang Dunia II. Pesan-pesan itu dicetak dan sebarluaskan lewat pesawat tempur Sekutu ke seluruh pelosok Maluku Utara (Tabloid Parada, edisi 5 tanggal 5-20 Mei 2001).

Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang berakhir ketika pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Serangan itu memaksa Kaisar Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Informasi penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu mendorong tokoh-tokoh pergerakan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Pegangsaan Timur, No.56, Jakarta. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia didampingi Bung Hatta dan para anggota PPKI. Proklamasi yang dikumandangkan itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi dan membentuk sebuah pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui penduduk kota Ternate pada awal September. Namun demikian, berita kemerdekaan RI ini dapat diketahui oleh penduduk di Halmahera Utara, khususnya di Pulau Morotai. Fasilitas komunikasi berupa radio milik tentara Sekutu dapat diakses luas. Sementara pihak militer Jepang di Galela juga memberitahukan hal itu kepada

penduduk. Dari merakalah berita kemerdekaan RI kemudian tersebar luas di Wilayah Maluku Utara.

Setelah kekalahan Jepang tanggal 17 Agustus 1945, *minseibu* yang dijabat Noro San melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternate dan Tidore. Termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Noro San mengucapkan pidato singkat, “Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami.” (Adnan Amal, 2003: 173).

Peserta pertemuan banyak yang bingung mendengar pidato singkat itu. Mereka belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Setelah itu, Noro San meminta kepada peserta untuk menerima pimpinan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon. Masing-masing Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka ke Chasan Boesoirie. Ia kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Maluku Utara untuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. (Chasan Bousoiri, *op. cit*, hlm. 43).

C. SULTAN TERNATE ISKANDAR DJABIR SJAH DAN PERANNYA DALAM PERANG TIMUR ASIA

Pada tanggal 15 September 1944, pasukan Sekutu yang dikomandoi Jenderal Douglas Mac Arthur, melakukan pendaratan di Pulau Morotai. Pasukan Sekutu yang melakukan pendaratan di Pulau Morotai terdiri dari dua divisi komando Australia (divisi 7 dan 9), serta satu divisi Tentara Amerika (divisi 93 Negro). Dari Morotai, Pasukan sekutu kemudian diterjunkan di Sulawesi Utara dan Selatan, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

Sementara divisi Tentara Amerika Negro ditugaskan membebaskan Filipina. Di Morotai, pasukan Sekutu kemudian membangun landasan pesawat terbesar di Pasifik dan menjadikannya sebagai markas komando (*operation base and consolidation*) atau sebagai basis pertahanan untuk menghadang pasukan Jepang yang berada di daerah Kao. Peperangan antara kedua pihak pun dimulai di wilayah Maluku Utara. Kekuatan militer Jepang terus mengalami kemunduran di hampir semua lini pertempuran itu. (Adnan Amal, dan Irza Arnita Djafar, 2003).

Pada tanggal 17 Oktober 1944, pesawat tempur Sekutu menjatuhkan bom di Pulau Ternate, terutama di Kampung Cina, Kampung Palembang, dan *Fort Orange*, menyebabkan puluhan orang meninggal serta luka parah. Akibatnya, penduduk mengungsi ke luar Pulau Ternate atau membangun lubang perlindungan yang disebut *lofra*. Keesokan harinya, Jepang meminta menggali lubang untuk mengubur para korban, tetapi banyak penduduk yang telah pergi, maka digunakan tenaga narapidana yang ditawan tentara Jepang untuk menggali kuburan massal. Keadaan darurat membuat semua korban dikubur tanpa dikafani.

Sementara itu, di Ternate Selatan, Tentara Jepang dengan kejam melakukan pembantaian massal terhadap rakyat di kampung Kastela dan Rua. Hal itu membuat marah Sultan Iskandar Djabir Sjah dan memerintahkan *gorela*, pasukan gerak cepatnya, memantau kegiatan tentara Jepang di wilayah Maluku Utara.

Posisi tentara Jepang yang terus terdesak di berbagai medan pertempuran di Maluku Utara membuat mereka merencanakan menangkap Sultan Iskandar Djabir Sjah. Sebagai penguasa di Maluku Utara, Sultan Iskandar Djabir Syah tentu saja memiliki ribuan pendukung setia yang dapat dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan memenangkan perang. Informasi tentang

rencana penangkapan sultan diketahui oleh pasukan Sekutu yang berada di Morotai. Pada tanggal 24 April 1945, Sultan Iskandar Djabir Sjah menerima surat dari Letnan Hubertus J. van Mook yang isinya: "Meminta Sultan dan keluarganya meninggalkan Ternate. Orang-orang Indo-Belanda diberi tahu bahwa Ternate akan dibom selama dua hari, yakni pagi hari pada pukul 06.00-09.00 dan sore pukul 16.00-18.00, dengan maksud untuk memberi kesempatan sultan dan keluarganya untuk lolos." (Chasan Bousoiri).

Pada bulan Mei 1944, panglima perang Sekutu Jenderal Mac Arthur menginstruksikan agar menjemput Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya dibawa ke Pulau Morotai. Pada bulan 1944, Sultan Ternate Muhammad Jabir Sjah, menerima sepucuk surat dari Panglima Perang Sekutu Jenderal Mac Arthur, yang diantarkan beberapa orang gerilyawan Indonesia yang berkerja-sama dengan Sekutu ke *kadaton* pada pukul 9 malam. Mereka membicarakan hal-hal yang serius dan sangat rahasia yang tidak bisa didengar orang lain kecuali sultan sendiri. Isi surat itu memerintahkan bahwa sultan Ternate dan keluarganya akan dievakuasi ke Morotai oleh satuan tentara Australia. Pasukan ini akan menjemput dan membawa sultan beserta keluarganya dengan perahu ke Pulau Hiri. Malam itu juga kami dibangunkan. Seluruh keluarga, yaitu istri dan anak-anak disuruh segera berkemas-kemas. Dengan terburu-buru kami meninggalkan *kadaton* berjalan kaki tanpa alas kaki sampai di Desa Togolobe. Dari sana kami dibawa ke Pulau Hiri. Sebuah perahu motor berkecepatan tinggi akan membawa sultan dan keluarganya dari Hiri ke Morotai. Usaha sekutu tersebut berhasil.

Pada tanggal 5 Oktober Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya berhasil dievakuasi dari Ternate oleh regu *Hulptropen* dibantu tentara Australia. Ia

pertama-tama dibawa ke Pulau Hiri kemudian ke pangkalan Sekutu di Morotai. Setiba di Morotai, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober, atas perintah Jenderal Mac Arthur, mereka diungsikan ke Brisbane, Australia, dan bermukim di sana hingga perang usai. Setibanya di Brisbane Australia, Sultan Ternate Djabir Syah dan keluarganya dijemput oleh Kapten Julius Tahia, yang ditugaskan untuk memindahkan penduduk sipil Belanda dari Jawa ke Australia. Mereka kemudian ditempatkan di Camp Colombia di Wacol. Kamp ini merupakan perkemahan besar masyarakat Indonesia dan Belanda yang terdiri dari orang-orang sipil dan militer. Namun di kamp ini, mereka hanya tinggal kurang lebih dua bulan. Setelah itu, mereka dipindahkan ke sebuah rumah yang dinamakan *Farmer House*. Setelah enam bulan mendiami *Farmer House*, mereka dipindahkan ke sebuah rumah peninggalan keluarga Belanda di *Brunswiek Street* berdekatan dengan Hotel Indonesia, tempat tinggal keluarga sultan lainnya. Rumah ini mereka ditempati sampai mereka dipulangkan ke Ternate.

Berita diungsikannya Sultan Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya oleh Sekutu, membuat Jepang marah. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan sultan untuk kepentingan perangnya. Sebagai seorang sultan yang memiliki kekuasaan luas (Propinsi Maluku Utara sekarang), ia tentu sangat dibutuhkan oleh Jepang. Luas wilayah kekuasaannya dan jabatan *kolano* (sultan) dianggap sakral oleh segenap rakyat. Titah sultan juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Fanatisme yang berlebihan terhadap seorang sultan memberi pengaruh yang kuat terhadap rakyatnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang maupun Belanda. Tetapi nasib baik lebih berpihak kepada Belanda karena dalam Perang Pasifik, panglima sekutu Jenderal Mac Arthur memerintahkan untuk mengungsikan sultan dan keluarganya ke Australia, sebagai suatu

strategi untuk mengamankan wilayah koloninya di Maluku Utara. Karena gagal mendapat dukungan dari Iskandar Djabir Sjah, Jepang kemudian melantik Muhammad Nasir (saudara Iskandar Djabir Syah) sebagai Sultan Ternate dan ditempatkan di Kao, pusat komando tertinggi Tentara Jepang di Halmahera. Pada waktu yang sama, Sultan Tidore, Zainal Alting, juga dijemput dari Soisio, Tidore, dan ditempatkan di Jailolo. Pengangkatan kedua sultan tersebut merupakan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.

Selama di Australia, Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah tidaklah secara penuh tinggal di sana, hanya keluarganya saja. Beberapa kali sultan dipanggil ke Morotai karena dibutuhkan oleh Sekutu untuk mempersatukan masyarakat Maluku Utara yang sudah berantakan selama pendudukan Jepang. Selama di Morotai, sultan diperintahkan memberitahu kepada rakyatnya tentang situasi perang yang sedang berlangsung. Pemberitahuan itu disiarkan lewat selebaran berbahasa Ternate, Galela, dan Tobelo agar penduduk menghindarkan diri dari rayuan propaganda Jepang yang menginginkan kemenangan dalam Perang Dunia II. Pesan-pesan itu dicetak dan sebarluaskan lewat pesawat tempur Sekutu ke seluruh pelosok Maluku Utara. Pada bulan September 1945, setelah kurang lebih lima bulan pergi-pulang Australia dan Morotai, sultan dipanggil ke Morotai, ia di-*militariseer* sebagai Letnan Kolonel untuk menerima *Over Civil Administration* di bawah perintah Jenderal Blamey dan wakilnya, Kolonel Thompson.

Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang berakhir ketika pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Serangan itu memaksa Kaisar Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus

1945. Informasi penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu mendorong tokoh-tokoh pergerakan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Pegangsaan Timur, No.56, Jakarta. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia didampingi Bung Hatta dan para anggota PPKI. Proklamasi yang dikumandangkan itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi dan membentuk sebuah pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui penduduk kota Ternate pada awal September. Namun demikian, berita kemerdekaan RI ini dapat diketahui oleh penduduk di Halmahera Utara, khususnya di Pulau Morotai. Fasilitas komunikasi berupa radio milik tentara Sekutu dapat diakses luas. Sementara pihak militer Jepang di Galela juga memberitahukan hal itu kepada penduduk. Dari merakalah berita kemerdekaan RI kemudian tersebar luas di Wilayah Maluku Utara.

Setelah kekalahan Jepang tanggal 17 Agustus 1945, *minseibu* yang dijabat Noro San melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternate dan Tidore. Termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Noro San mengucapkan pidato singkat, "Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami."

Peserta pertemuan banyak yang bingung mendengar pidato singkat itu. Mereka belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Setelah itu, Noro San meminta kepada peserta untuk menerima pimpinan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon. Masing-masing Arnold

Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka ke Chasan Boesoirie. Ia kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Maluku Utara untuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Masa jabatan sementara Chasan Boesoirie sebagai kepala daerah yang dipilih oleh Jepang tidak berlangsung lama. Pada bulan September 1945, jabatan tersebut diserahkan kepada Sultan Iskandar Djabir Syah yang telah dilantik oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Residen Maluku Utara. Dengan pengangkatannya sebagai residen yang membawahi dua *afdeling*—*afdeling Noord Molukken* dan *Afdeling Tidore*, sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil hingga bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*). Selain Pulau Morotai, Bacan dan Tidore juga memperoleh status yang sama. Status keswaprajaan itu kemudian ditingkatkan menjadi *afdeling* dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara.

D. PEYERAHAN KEKUASAAN JEPANG DI MALUKU UTARA

Segera setelah Jepang menyerah, markas besar pasukan sekutu di Morotai mengeluarkan perintah pelucutan senjata tentara Jepang. Mereka harus memusnahkan diri seluruh peralatan militernya, dan sengan tidak bersenjata semua pasukan Jepang di Maluku Utara – termasuk para Heiho – berkumpul di Kao, menunggu kapal yang akan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Beberapa perwira Jepang dan oknum kenpetai, yang dipandang sebagai penjahat perang, dibawah sekutu ke Morotai. Tetapi, nasib mereka tidak diketahui dengan pasti. Untuk memusnahkan peralatan

militernya, Jepang membutuhkan waktu satu bulam. Selain dirusak, banyak senjata berat dan senapan di tenggelamkan ke laut atau dibenamkan ke dasar danau Galela.

Setelah kekalahan Jepang, pada 25 Agustus 1945, Minseibu melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternatedan Tidore, termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Minseibu mengucapkan pidato singkat: “Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami.”

Mendengar pidato seingkat itu banyak peserta pertemuan bengong, karena belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah itu, Minseibu meminta kepada peserta pertemuan mengajukan calon kepala daerah yang akan menerima pimpinan kekuasaan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon: Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka kepada Boesoirie, dan ia dikukuhkan sebagai pejabat sementara kepala daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang.

Pada september 1945, dua korvet Australia membawa pulang Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah. Ketika merapat di dermaga Ternate, Sultan turun dikawal beberpa serdadu Australia dan di iringi sejumlah perwira NICA. Selama di Australia, Sultan telah menjalin kontak yang intens dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan yang dipimpin van Mook. Hasilnya, Maluku Utara kembali memperoleh status keresidenan dan seltan sendiri di angkat sebagai residennya.

Jabatan kepala daerah sementra kemudian diserahkan Boesoirie kepada Sultan. Dengan pengangkatannya sebagai Residen yang membawahi dua *afdeling*—*afdeling noord*

Molukken dan Afdeling Tidore-sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (Hoofd van Plaatselijk Bestuur), selama sekutu masi berada disana. Selain morotai, Bacan dan Tidore memperoleh status yang sama. Status kesewaprajaan ini kemudian ditingkatkan menjadi afdeling dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara.

KESIMPULAN

Pada jaman pendudukan Jepang, daerah Maluku merupakan salah satu dari ke empat wilayah pemerintahan di Indonesia bagian Timur dengan pusatnya di Kota Makasar. Ke empat wilayah itu adala Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin, Sulawesi dengan ibu kota Makasar, Nusatenggara dengan ibu kota Denpasar di Bali dan Maluku dengan ibu kota Ambon. Masing-masing wilayah ini dikuasai seorang Gubernur Militer. Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan laut Jepang (Kaigun)

Selama pendudukan Jepang tidak terdapat perubahan-perubahan yang penting di dalam tata pemerintahan. Pemerintahan lebih bersifat militer atau disesuaikan dengan kepentingan militer. Pada waktu itu terdapat juga aparat-aparat pemerintaan sipil yaitu Minseibu Chokan, semacam kepala daerah yang berkedudukan di Ambon Tual dan ternate. Namun dalam banyak hal kekuasaan pemerintahan sipil ini dibatasi atau tunduk kepada kekuasaan militer, sehingga wewenang pemerintahan sipil hamper tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut berlangsung hingga menyerahkan Jepang pada sekutu tahun 1945.

Penduduk Jepang selama tiga setengah tahun mengubah seluruh struktur masyarakat kolonial yang dibina oleh Belanda. Dalam waktu yang singkat semua orang kulit putih dihilangkan dari pandangan masyarakat.

Mereka semua ditawan dalam kamp-kamp konsentrasi. Sebagai pengganti mereka dan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan sebagai pegawai. Jepang mengangkat orang-orang Maluku secara langsung. Pegawai-pegawai bekas Pemerintahan Belanda dan guru-guru sekolah tetap bekerja sebagai semula akan tetapi gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat. Meksipun mereka boleh memegang pemerintahan sendiri, namun mereka tidak bebas sama sekali dalam geraknya. malah kebebasan itu lebih dipersempit lagi dari zaman colonial Belanda. Masyarakat sangat takut terhadap aparat pengamanan dan dinas rohasia atau mata-mata jepang yaitu Kempetai, semacam polisi militer yang mempunyai kekuasaan idak terbatas, organisasi-organisasi social hanya dapat didirikan kalau dibentuk sendiri oleh Jepang. Semua organisasi dan gerakan politik, berupa partai politik, organisasi pemuda atau apapun yang berbau politik dan bertentangan dengan ideologi Jepang dilarang sama sekali. Sejak saat itu organisasi pergerakan nasional yang suda ada di Ambon dan tempat-tempat lain tidak lagi menampakan diri. Untuk membantu tentara Jepang memenangkan peperangan melawan Sekutu, maka bekas tetara KNIL dijadikan Heiho yaitu pembantu parajurit Jepang dan dikirim ke daerah-daerah perang sebagai pekerja. Pengawasan yang ketat juga dilakukan terhadap masyarakat, terlebih dikota-kota. Dapat dikatakan bahwa kehidupan pada waktu itu serba menakutkan.

Daftar Pustaka

- Amal, A., dan Djafar, I.A. (2003). *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950* Jilid 2. Ternate, Unkhair.
- Hasan, A. H. (2000). *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Arsip pribadi yang ditulis langsung oleh Iskandar Muhammad Djabir Syah,

berupa riwayat hidup singkat pada tanggal 24 Agustus 1950.

Bousoiri, C. *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta.

Nachrawy, Herry RD. (2003). *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate, Yayasan Kie Raha.

Djafar, I. A. (2005). *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta: Bio Pustaka.

Muslim, J. (2012). *Antara Unitarisme dan Federalisme: Kesultanan Ternate Pada masa Revolusi (1945-1950)*, Tesis S2 Sejarah Universitas Gadjah Mada.

Rajilun, L. (1982). *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, Ternate: Depdikbud.

Hasim, R. (2019). *Sultan Dalam Sejarah Politik Ternate*, Lepkhair, Universitas Khairun.

Leirissa, R.Z. (1975). *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI.

Nalanan, R. (1981). *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*. Jakarta: Gubung Agung.

Kutoyo, S. (1977). *Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Waworuntu, S. (1996). *Sekelumit Kisah Hidup Rini Waworuntu*, Jakarta: Tanpa Penerbit.